



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERI YANTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, UMUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN**
3. NHK : **251403**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m<sup>2</sup>/80 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 472 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **841.800.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ZENIX HYBRID TYPE Q Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **480.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **283.469.608**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**



Sub Total	Rp.	2.705.269.608
III. HUTANG	Rp.	307.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.397.769.608

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.